



Transisi Demokrasi di Asia Tenggara: Ancaman dan Strategi Ketahanan Nasional

Description

Pendahuluan

Di Asia Tenggara, demokrasi bergerak seperti gelombang—tidak serempak, tidak seragam, dan sering patah di karang institusi. Setelah tiga dekade pasca-Perang Dingin, kawasan ini menampilkan spektrum warna politik: dari demokrasi elektoral yang rentan kooptasi oligarki, rezim hibrida yang mempertahankan façade kompetisi, sampai otoritarianisme yang belajar beradaptasi dengan ekonomi pasar. Indeks Demokrasi EIU 2024 menandai tren penurunan regional: skor rata-rata Asia–Australasia turun dari 5,41 ke 5,31 (skala 0–10), menandai tahun keenam stagnasi atau regresi. Hanya sebagian kecil populasi regional yang hidup dalam demokrasi substantif; porsi besar berada dalam rezim otoritarian atau hibrida (Economist Intelligence Unit, 2025).

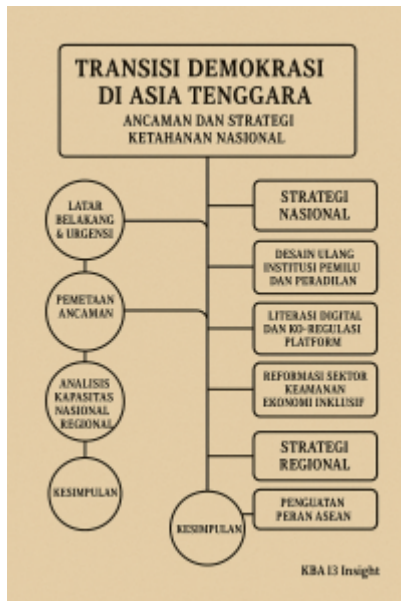
Dalam laporan EIU 2024, catatan global bahkan lebih muram: skor dunia jatuh ke 5,17 (terendah sejak 2006), dengan hanya 45% populasi dunia hidup di bawah demokrasi, 39% dalam otoritarianisme, dan 15% dalam rezim hibrida. Meski 2024 adalah “tahun pemilu terbesar”, kualitas prosedural tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas liberal dan substantif (EIU, 2025).

Di sisi lain, V-Dem Democracy Report 2025 memotret autokratisasi 25 tahun terakhir: Asia Timur dan Tenggara mengalami penurunan pada Liberal Democracy Index serta indikator deliberatif–egalitarian, dengan tekanan khusus pada kebebasan sipil, integritas pemilu, dan ruang masyarakat sipil. Tren ini disertai repertoar baru represi digital—pembungkahan undang-undang ITE/siber, manipulasi platform, sensor halus—yang menggerus legitimasi pemilu dan kepercayaan publik (V-Dem, 2025).

Di tengah itu semua, ketahanan nasional harus dibaca lebih dari sekadar kemampuan menahan guncangan fisik. Dalam kerangka ketahanan demokrasi (Croissant, 2024), ada preventive resilience (kapasitas mencegah krisis melalui institusi—peradilan independen, pemilu adil, kontrol sipil atas militer) dan reactive resilience (kapasitas memulihkan tatanan pascaguncangan). Asia Tenggara menunjukkan asimetri: beberapa negara kuat pulih pascakerusuhan atau krisis, tetapi lemah mencegah siklus krisis berikutnya. Lalu lintas pengaruh eksternal—kompetisi kekuatan besar, arsitektur digital global, investasi strategis—menciptakan tekanan geosekuri yang memengaruhi pilihan domestik:

kapen menahan, kapen adaptif, kapen kompromi.

Dalam konteks ini, tulisan menelaah ancaman yang menekan transisi demokrasi dan strategi untuk memperkuat ketahanan regional ASEAN sebagai kerangka normatif–operasional regional.



Peta Jalan Konseptual
Transisi Demokrasi di Asia
Tenggara

Tinjauan Literatur

Literatur transisi demokrasi klasik memandang perubahan rezim sebagai hasil negosiasi elite, mobilisasi massa, dan desain lembaga (O'Donnell, Schmitter, & Whitehead, 1986). Mietzner menunjukkan di Indonesia, jatuhnya otoritarianisme membuka kanal kompetisi, tetapi oligarki beradaptasi dalam partai, pendanaan politik, media, dan kebijakan, sehingga mengubah demokrasi menjadi arena kontestasi elit?pluralis yang mudah tergelincir pada regresi (Mietzner, 2020). Merkel mengajak melihat demokrasi sebagai struktur embedded: pemilu bebas?adil, hak politik, kebebasan sipil, kontrol horizontal, serta pemerintahan efektif. Kerusakan satu pilar merembet ke lainnya, menghasilkan defective/illiberal democracy.

Di Asia Tenggara, V?Dem dan Freedom House 2024 memvalidasi penurunan kebebasan sipil dan hak politik. Thailand naik status menjadi Partly Free berkat pemilu kompetitif 2023, tetapi konstitusi hasil militer mendistorsi pembentukan pemerintahan dan membatasi oposisi pemenang—merekam paradoks antara kompetisi elektoral dan struktur veto non?terpilih (Freedom House, 2024).

Dari sudut ketahanan, Croissant (2024) menekankan pembedaan pencegahan dan pemulihan. Keduanya butuh desain institusional (IDEA, 2023) dan ekosistem informasi sehat (ISEAS, 2023/2024). Represi digital dan ekonomi atensi memperbesar risiko kognitif: masyarakat terjebak disinformasi, polarisasi, dan demobilisasi. ISEAS 2023 memperkenalkan dimensi "imaginative disorder"—cara disinformasi merasuk melalui imajinasi kolektif, bukan sekadar mis?info faktual (Cabañes; ISEAS). ISEAS 2024 menelusuri bagaimana perangkat represi digital berevolusi: dari sensor tradisional ke

orquestrasi regulasi platform—serangan siber—operasi informasi.

ASEAN sebagai kerangka normatif menganut non-interference, namun krisis Myanmar memaksa inovasi prosedural. Lima Poin Konsensus (5PC) 2021 menjadi jangkar diplomasi, tetapi implementasi minim hingga ditinjau ulang pada KTT 2024, dengan penegasan keprihatinan atas progres yang sangat tidak memadai serta dorongan penguatan bantuan kemanusiaan dan konsultasi informal lanjutan (ASEAN, 2024; RSIS, 2024).

Profil Negara ASEAN: Dinamika dan Tipe Transisi

Indonesia pasca-1998 mempertahankan siklus pemilu reguler dan desentralisasi, namun kualitas liberal menurun karena polarisasi identitas, oligarki pembiayaan politik, dan fragmentasi penegakan hukum. Pemilu 2024 mengonfirmasi Prabowo Subianto–Gibran sebagai pemenang (58,6%) setelah MK menolak sengketa; dinamika ini memperlihatkan reactive resilience (kontestasi legal–institusional berjalan) namun mempertajam perdebatan preventive resilience (etik penyelenggara, konflik kepentingan, serta desain pengawasan kampanye dan bansos) (AP, 2024; Reuters, 2024; DPR RI P3DI, 2024).

Malaysia mengalami “democratic opening” 2018, kemudian ketidakstabilan koalisi 2020–2022. Tahun 2024, pemerintahan Anwar Ibrahim mengonsolidasikan agenda MADANI—rasionalisasi subsidi, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan reformasi fiskal—namun menghadapi politik identitas dan koalisi majemuk yang membatasi manuver reformasi (Bernama, 2024; East Asia Forum, 2025; The Malaysian Insight, 2024). Ketahanan demokrasi menapak lewat stabilitas eksekutif yang relatif membaik, sementara reformasi kelembagaan berjalan bertahap.

Thailand menampilkan paradoks paling terang. Pemilu 2023 memenangkan Move Forward, tetapi Senat non-terpilih dan perangkat hukum Pasal 112 memblokir transisi substantif. Pada Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi membubarkan Move Forward dan melarang jajaran puncaknya—titik balik yang menegaskan veto structure di atas mandat elektoral (Reuters, 2024; Le Monde, 2024). Dinamika ini memperlihatkan demokrasi prosedural rentan penyumbatan institusional, memicu siklus delegitimasi dan apatia publik (Time/The Guardian, 2024).

Myanmar sejak kudeta 2021 masuk fase perang saudara luas. ASEAN 5PC belum menghasilkan de-eskalasi yang berarti; peninjauan 2024 kembali menegaskan kurangnya progres dan fokus pada akses kemanusiaan (ASEAN, 2024; RSIS, 2024). Wacana pemilu oleh junta dipandang kosmetik dan kontra-produktif terhadap inklusi. Ketahanan nasional—baik preventif maupun reaktif—kolaps; indikator hak politik dan kebebasan sipil merosot drastis.

Filipina mempertahankan tradisi pemilu kompetitif, tetapi populisme dan represi informasi mencederai ruang sipil. Freedom on the Net 2024 mencatat penurunan akibat serangan siber terhadap media, pembatasan konten, dan pelanggaran hak pengguna (Freedom House, 2024). Ekosistem media yang tertekan bertemu regulasi ambigu atas disinformasi—“tightrope” antara penegakan dan kebebasan (Reuters Institute, 2024; Philstar, 2025).

Vietnam menekankan stabilitas otoritarian-pembangunan, tetapi kampanye anti-korupsi “blazing furnace” mengakibatkan resignasi Presiden Vo Van Thuong (Maret 2024) dan perombakan elite—gejala turbulensi intra-partai yang mengubah kalkulus kebijakan dan iklim investasi (Reuters,

2024; Al Jazeera, 2024). Pemerintah menegaskan orientasi ekonomi dan luar negeri tetap konsisten, tetapi volatilitas elite memunculkan pertanyaan soal koordinasi kebijakan jangka menengah (Reuters, 2024).

Kamboja melanjutkan transmisi kekuasaan intra?dinasti pasca?pemilu 2023, dari Hun Sen ke Hun Manet; Senat 2024 dikonfigurasi sehingga Hun Sen kembali memegang posisi Presiden Senat, mempertebal kontrol institusional atas lanskap politik. Laporan HRW 2024 menilai pengetatan terhadap oposisi, serikat, dan LSM berlanjut (AP, 2024; HRW, 2024; Reuters, 2023).

Timor?Leste tampil sebagai anomaly positif: status “Free” dalam Freedom House 2024, pemerintahan hasil pemilu 2023 relatif stabil, meski ekonomi masih rentan terhadap siklus pendapatan migas; secara demokratis, institusi elektoral dan kebebasan pers menonjol di atas rata?rata kawasan (Freedom House, 2024; Reuters, 2023; Time, 2024).

Singapura, Laos, Brunei mempertahankan non?liberal stability dalam variasi berbeda: Singapura menampilkan kompetisi terbatas (mis. pilpres 2023), sedangkan Laos dan Brunei beroperasi dalam sistem terkonsolidasi non?demokratis dengan fokus legitimasi pada pertumbuhan, ketertiban, dan nilai tradisional (Straits Times/Time untuk konteks pemilu presiden Singapura).

Ancaman terhadap Demokrasi & Ketahanan Nasional

Backsliding terstruktur. Data V?Dem 2025 memotret penurunan multi?dimensi—elektoral, liberal, deliberatif—dengan penopang utama yang runtuh: independensi peradilan, pemberantasan korupsi, dan integritas pemilu. Di Thailand, “veto institusional” oleh militer?yudisial membatalkan preferensi elektoral; di Myanmar, kekerasan negara menutup kompromi; di Indonesia dan Filipina, polarisasi berkelindan dengan korosi akuntabilitas. Akumulasi ini memukul legitimasi, menyuburkan apatia, atau mendorong radikalasi pinggiran (V?Dem, 2025; Freedom House, 2024).

Represi & disinformasi digital. ISEAS (2023) menunjukkan disinformasi bekerja bukan hanya lewat fakta palsu, melainkan narasi imajinatif yang menyambung aspirasi dan ketakutan. ISEAS (2024) mengurai perangkat represi digital: UU siber, sensor platform, pembajakan narasi melalui influencer/proxy, dan serangan siber ke media. Freedom on the Net 2024 mencatat penurunan di Filipina akibat serangan siber ke media dan pembatasan konten. Efek strategisnya: degradasi literasi demokratis, penurunan trust pada pemilu, dan fragmentasi epistemik (ISEAS 2023/2024; Freedom House 2024).

Intervensi militer & veto non?terpilih. Thailand memutakhirkan model legal?autoritarian: pemilu berlangsung, tetapi partai pemenang dibubarkan dan pemimpin dibatasi oleh yurisprudensi politik (Reuters/Le Monde, 2024). Myanmar menandai kolaps ketahanan: kekerasan, displacement, dan ekonomi perang. ASEAN mengonfirmasi progres 5PC tidak memadai pada 2024, mendorong jalur kemanusiaan daripada politik elektoral cepat (ASEAN, 2024; RSIS, 2024).

Ketimpangan & legitimasi. Ketimpangan tinggi—paparan krisis (pandemi, komoditas) menghasilkan volatilitas legitimasi; pemerintah cenderung memakai kebijakan redistributif ad?hoc atau surveilans sosial untuk mengelola ketidakpuasan—langkah yang jika tanpa akuntabilitas memperparah defisit kepercayaan (sintesis berbagai laporan EIU/V?Dem/FH).

Strategi Ketahanan Nasional & Regional (Naratif)

Membangun ketahanan demokrasi membutuhkan arsitektur institusional dan ekologi informasi yang kompatibel dengan struktur sosial kawasan. Pertama, penguatan institusi: independensi peradilan, komisi pemilu anti-intervensi, transparansi pembiayaan politik, dan audit kebijakan sosial—khususnya di masa pemilu—agar bantuan tidak menjadi instrumen kooptasi. IDEA (2023) menekankan desain institusi untuk menahan bad times: buffer checks and balances saat tekanan meningkat. Indonesia 2024 memperlihatkan pentingnya standar etik penyelenggara; Malaysia 2024 menunjukkan nilai stabilitas koalisi untuk mengawal agenda reformasi (IDEA; Bernama/East Asia Forum).

Kedua, literasi digital & perlindungan ruang sipil. Negara perlu kurikulum literasi media yang mengasah verifikasi & penalaran kausal, plus regulasi platform berbasis transparansi algoritmik—dengan guardrails agar pemberantasan hoaks tidak bermuara ke over-blocking. ISEAS 2023/2024 menekankan ko-regulasi: pemerintah, platform, dan CSO berbagi peran; Freedom on the Net 2024 memberi cermin trade-off ketika regulasi bergeser ke pembatasan.

Ketiga, reformasi sektor keamanan. Model kontrol sipil wajib dipulihkan: netralitas militer, profesionalisasi, dan transparansi anggaran. Pengalaman Thailand 2024 mengingatkan bahaya yudikalisasi konflik politik—solusinya bukan menyingkirkan peradilan, melainkan menutup celah politisasi hukum pidana publik melalui reformasi legislatif dan norma due process yang lebih ketat (Reuters/Le Monde/Time).

Keempat, ASEAN sebagai firewall normatif. Kaji ulang 5PC mengarah ke humanitarian-first sambil menolak electoralism semu di Myanmar. Opsinya: mekanisme konsultasi informal plus sanksi reputasional, penguatan envoy dengan mandat teknis, dan task force kemanusiaan lintas kementerian. ASEAN Review 2024 sudah menyiratkan dorongan ke arah itu (ASEAN; RSIS).

Kelima, ekonomi inklusif & tata kelola. Reformasi subsidi-fiskal Malaysia 2024 memberi pelajaran: legitimasi meningkat saat redistribusi dan perlindungan sosial dikomunikasikan jujur berbasis data, bukan populisme fiskal jangka pendek (Bernama; The Malaysian Insight).

Indonesia 2024 – “Stabilitas elektoral, sengkarut etika”. Kemenangan satu putaran 58,6% memproyeksikan stabilitas permukaan. Namun narasi dinamika etika—mulai kontroversi kewenangan lembaga hingga persepsi konflik kepentingan—mendorong tuntutan standar akuntabilitas baru pascareformasi. Ketahanan reaktif bekerja (sengketa disalurkan ke MK; putusan diterima aktor utama), tetapi pilar preventif butuh diperkuat: regulasi pembiayaan kampanye, perlindungan whistleblower, dan kejelasan aturan bansos di masa pemilu (AP; Reuters; DPR RI P3DI).

Thailand 2023–2024 – “Veto institusional atas mandat elektoral”. Pemenang pemilu Move Forward diblokir oleh Senat non-terpilih, disusul pembubaran partai serta pelarangan elite. Ini mengirim sinyal kuat: institusi veto masih memegang kunci, bukan preferensi pemilih. Dampaknya strategis: depolitisasi pemilih muda atau, sebaliknya, radikalisasi tuntutan reformasi—keduanya mengikis legitimasi jangka panjang (Reuters; Le Monde; Time/Guardian).

Myanmar 2021–2024 – “Kolaps ketahanan, beban regional”. Kekerasan meluas, ekonomi terperangkap, dan krisis kemanusiaan menyeberang batas. ASEAN mengkalibrasi ulang fokus dari

retorika pemilu menuju akses kemanusiaan dan de?eskalasi bersyarat. Outcome realistis jangka pendek: penurunan intensitas konflik lokal, bukan rekonsiliasi politik menyeluruh (ASEAN Review 2024; RSIS 2024).

Malaysia 2024 – “Stabilitas koalisi dan politik rasionalisasi”. Upaya Anwar menyusun ulang arsitektur subsidi dan fiskal menunjukkan window of opportunity untuk reformasi struktural, tetapi politik identitas dan koalisi majemuk menuntut governance melalui persuasi: komunikasi risiko?manfaat yang konsisten dan kompensasi sosial tepat sasaran (Bernama; East Asia Forum; The Malaysian Insight).

Filipina 2024 – “Kresek epistemik”. Freedom on the Net 2024 menandai penurunan; serangan siber–pembatasan konten melemahkan ruang deliberasi. Tantangan kebijakan: regulasi anti?disinformasi yang tidak menyalakan efek beku pada kebebasan berekspresi—membutuhkan co? regulation dan due process (Freedom House; Reuters Institute; Philstar).

Vietnam 2024 – “Turbulensi elite dalam otoritarian?pembangunan”. Resignasi Vo Van Thuong menggambarkan biaya politik kampanye anti?korupsi “blazing furnace”. Sinyal ke pasar: kebijakan makro tetap, tetapi ketidakpastian koordinasi bisa meningkat. Ini lesson bagi ASEAN: stabilitas otoritarian bukan jaminan prediktabilitas kebijakan (Reuters; Al Jazeera).

Kamboja 2024 – “Kontinuitas dinasti, konsolidasi prosedural”. CPP mengunci Senat; Hun Sen menempati kursi puncak legislatif atas, sementara Hun Manet menjalankan pemerintahan. HRW 2024 menilai ruang oposisi–serikat–media tetap sempit. Arsitektur single?dominant ini memberi stabilitas administratif, tetapi mengerosi akuntabilitas (AP; HRW; Reuters).

Timor?Leste – “Outlier demokratis”. Status Free konsisten, tetapi tantangan transformasi ekonomi dan ketergantungan migas menguji resiliensi fiskal—faktor penting bagi resiliensi liberal jangka menengah (Freedom House; Reuters; Time).

Pembahasan dan Rekomendasi

Pembacaan terhadap situasi demokrasi Asia Tenggara hingga 2024 memperlihatkan adanya *paradox of progress*: di satu sisi, prosedur demokrasi seperti pemilu tetap berlangsung di sebagian besar negara, namun di sisi lain kualitas substansialnya stagnan atau menurun. Fenomena ini tidak hanya menegaskan teori *democratic backsliding* (Bermeo, 2016), tetapi juga menunjukkan bahwa **ketahanan demokrasi** di kawasan lebih sering bersifat *reactive* ketimbang *preventive*.

Pertama, pada level institusi, kita melihat pola di mana desain kelembagaan belum cukup melindungi demokrasi dari kooptasi oligarki, veto aktor non-terpilih, dan represi digital. Indonesia 2024 menjadi studi kasus paling jelas: pemilu berjalan, sengketa diproses di MK, tetapi perdebatan etik dan legitimasi tetap membayang. Thailand, bahkan lebih ekstrem, memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan dan konstitusi hasil militer dapat memblokir pemenang pemilu. Myanmar menunjukkan kegagalan total dari kedua dimensi resiliensi.

Kedua, pada level ekosistem informasi, hasil riset ISEAS (2023, 2024) dan *Freedom on the Net* (2024) memotret evolusi ancaman dari disinformasi dan represi digital. Disinformasi tidak hanya menyebarkan kebohongan faktual, tetapi juga mengonstruksi narasi yang memengaruhi imajinasi kolektif dan preferensi politik. Regulasi platform tanpa *guardrail* mengakibatkan *over-blocking* yang membatasi

kebebasan berekspresi.

Ketiga, dari sisi ekonomi politik, ketimpangan sosial-ekonomi memperlemah legitimasi pemerintahan demokratis. Malaysia 2024 memberikan contoh positif melalui kebijakan MADANI yang mencoba merasionalisasi subsidi dan mengatasi kemiskinan ekstrem, namun di negara lain kebijakan redistributif masih sporadis atau justru dijadikan instrumen politik elektoral.

Keempat, dalam konteks regional, ASEAN masih terperangkap dalam dilema prinsip *non-interference* versus kebutuhan intervensi normatif. 5PC untuk Myanmar menjadi bukti bahwa tanpa mekanisme penegakan, konsensus hanya menjadi retorika. Peninjauan 2024 yang menekankan bantuan kemanusiaan adalah langkah realistis, tetapi belum menyentuh akar masalah.

Rekomendasi Kebijakan

Desain Ulang Institusi Pemilu dan Peradilan

Transisi demokrasi yang sehat tidak mungkin berlangsung tanpa institusi yang tahan terhadap intervensi kekuasaan. Di Asia Tenggara, kelemahan independensi lembaga pemilu kerap menjadi pintu masuk manipulasi hasil dan proses, merusak legitimasi sistem politik. Reformasi mendasar harus dimulai dengan memperkuat komisi pemilu, bukan sekadar di atas kertas, melainkan dengan mekanisme pengawasan lintas lembaga yang melibatkan parlemen, lembaga yudisial, dan masyarakat sipil. Independensi ini hanya akan bermakna jika didukung oleh regulasi transparansi pembiayaan politik yang jelas, disertai audit publik yang tidak dapat diintervensi oleh kepentingan partai atau pemerintah. Setiap aliran dana kampanye harus terpantau dan terbuka, sehingga politik uang kehilangan ruang gerak.

Sementara itu, peradilan perlu menjadi benteng terakhir yang menolak tekanan politik, terutama pada kasus-kasus yang menyentuh kepentingan elite. Peningkatan kapasitas hakim dan pengadilan, termasuk dalam hal perlindungan hukum, pelatihan etika, dan jaminan keamanan bagi pengambil keputusan, akan menentukan sejauh mana demokrasi mampu melindungi dirinya dari kooptasi kekuasaan. Tanpa peradilan yang berani menolak intervensi, hukum akan menjadi instrumen politik, bukan penegak keadilan.

Literasi Digital dan Ko-Regulasi Platform

Di era disinformasi dan polarisasi digital, kekuatan demokrasi bergantung pada kemampuan warganya memilah informasi. Literasi media tidak bisa lagi menjadi program temporer yang muncul menjelang pemilu; ia harus terintegrasi dalam kurikulum sekolah sejak dini, membentuk generasi yang kritis terhadap sumber informasi, memahami bias, dan mampu membedakan fakta dari propaganda.

Namun, literasi saja tidak cukup. Diperlukan sebuah **Dewan Ko-Regulasi Digital** yang menggabungkan pemerintah, platform teknologi, dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk menetapkan standar transparansi dan tanggung jawab bersama. Dewan ini menjadi penghubung antara kebutuhan regulasi dan kebebasan berekspresi, memastikan bahwa upaya melawan disinformasi tidak berubah menjadi alat sensor politik. Platform digital besar wajib menerbitkan laporan transparansi setiap triwulan, memuat data moderasi konten, permintaan penurunan materi, dan

kebijakan algoritmik, sehingga publik dapat menilai konsistensi komitmen mereka terhadap demokrasi.

Reformasi Sektor Keamanan

Netralitas militer dan aparat keamanan adalah syarat mutlak bagi transisi demokrasi yang kredibel. Di banyak negara Asia Tenggara, bayang-bayang intervensi militer masih mengancam stabilitas politik. Hal ini hanya bisa dihapus dengan undang-undang yang tegas mengatur netralitas militer, menetapkan batas keterlibatan mereka dalam urusan sipil, dan membangun mekanisme pertanggungjawaban yang independen.

Profesionalisasi aparat menjadi agenda penting, dengan pelatihan yang berfokus pada hak asasi manusia, hukum humaniter, dan standar operasional internasional. Tidak kalah penting adalah transparansi belanja militer—bukan hanya dalam nominal, tetapi juga dalam peruntukannya. Audit publik yang rutin akan mengurangi potensi korupsi dan memastikan bahwa anggaran pertahanan digunakan untuk melindungi negara, bukan untuk memperkuat posisi politik kelompok tertentu.

Ekonomi Inklusif sebagai Ketahanan Demokrasi

Demokrasi yang stabil memerlukan pondasi ekonomi yang inklusif. Ketimpangan ekonomi menjadi bahan bakar populisme dan otoritarianisme. Oleh karena itu, redistribusi harus berbasis data kemiskinan multidimensi, bukan hanya ukuran pendapatan, agar kebijakan benar-benar menyasar kerentanan yang riil di lapangan. Program perlindungan sosial harus adaptif, siap merespons guncangan seperti krisis pangan, bencana, atau resesi global.

Selain itu, demokrasi akan lebih kokoh jika sektor ekonomi menengah tumbuh kuat. Insentif fiskal bagi usaha kecil dan menengah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kelas menengah yang menjadi penopang utama demokrasi. Kesejahteraan yang tersebar merata akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada patronase politik, sehingga mempersempit ruang bagi politik transaksional.

Penguatan Peran ASEAN

Di tingkat regional, ASEAN harus melampaui peran sebagai forum diplomasi formal. Adopsi **ASEAN Democratic Charter** dengan indikator kinerja yang terukur akan memberikan tolok ukur objektif bagi kemajuan demokrasi di kawasan. Charter ini dapat menjadi rujukan bersama, mengikat negara anggota pada standar minimum yang jelas, dan menjadi dasar untuk menilai kepatuhan mereka.

Mekanisme sanksi reputasional juga perlu diterapkan bagi negara yang melanggar prinsip demokrasi, baik melalui penurunan status dalam pertemuan resmi, pembatasan akses pada program kerja sama tertentu, atau publikasi penilaian yang memengaruhi citra internasional mereka. Dalam kasus krisis politik, mandat **Special Envoy** ASEAN harus diperkuat, tidak hanya sebagai mediator simbolis, tetapi sebagai aktor dengan akses langsung ke proses negosiasi, didukung mandat yang jelas untuk mendorong solusi yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Demokrasi di Asia Tenggara pada 2024 berada dalam kondisi yang rapuh secara struktural. Tidak ada satu pun negara ASEAN yang berada di kategori “demokrasi penuh” menurut EIU. Timor-Leste menjadi *outlier* positif, sedangkan Myanmar adalah *outlier* negatif. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina berada di tengah, berjuang mempertahankan demokrasi di tengah tekanan oligarki, populisme, dan represi digital.

Ketahanan nasional yang berbasis demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pencegahan dan pemulihan. Tanpa reformasi institusi, perlindungan ruang sipil, pengendalian militer, dan kerja sama regional yang lebih berani, demokrasi di Asia Tenggara akan terus menjadi *democracy in limbo*—prosedural ada, substansi minim.

Lampiran 1 – Tabel Perbandingan Skor Demokrasi ASEAN (EIU, Freedom House, V-Dem)

Negara	EIU 2010	EIU 2024	Freedom House 2024 (0-100)	V-Dem LDI 2024 (0-1)	Status FH
Indonesia	6.53	6.44	59	0.54	Partly Free
Malaysia	6.19	7.11	73	0.58	Partly Free
Thailand	5.67	4.09	30	0.34	Not Free
Myanmar	3.55	1.02	7	0.05	Not Free
Filipina	6.94	6.63	55	0.51	Partly Free
Timor-Leste	7.24	7.03	86	0.63	Free
Vietnam	2.96	2.93	19	0.11	Not Free
Laos	2.10	2.02	12	0.08	Not Free
Brunei	3.28	3.19	28	0.15	Not Free
Singapura	6.45	6.13	48	0.46	Partly Free

Sumber: EIU Democracy Index 2010 & 2024, Freedom House 2024, V-Dem 2024.

Lampiran 2 – Threat Matrix Demokrasi Asia Tenggara 2024

Ancaman Utama	Negara dengan Risiko Tinggi	Dampak terhadap Ketahanan Nasional	Indeks Relevan
Polarisasi Identitas	Indonesia, Malaysia	Fragmentasi sosial, konflik horizontal	FH Civil Liberties
Veto Militer / Non-terpilih	Thailand, Myanmar	Krisis legitimasi, instabilitas pemerintahan	V-Dem Electoral Democracy
Represi Digital	Filipina, Vietnam	Penurunan kebebasan berekspresi	Freedom on the Net
Ketimpangan Ekonomi	Filipina, Indonesia	Erosi legitimasi demokrasi	EIU Functioning of Govt

Ancaman Utama	Negara dengan Risiko Tinggi	Dampak terhadap Ketahanan Nasional	Indeks Relevan
Oligarki Politik	Indonesia, Filipina	Hambatan reformasi institusi	V-Dem Political Equality

- Anwar, D. F. (2023). *ASEAN and the challenge of promoting democracy*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Aspinall, E. (2019). Polarization, identity politics, and democracy in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 120–134. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0068>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). Indonesian politics in 2014: Democracy's close call. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 347–369. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980375>
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>
- Case, W. (2021). Malaysia's democratic opening and its closure. *Asian Affairs*, 52(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/03068374.2021.1882705>
- Chambers, P. (2020). Military politics in Thailand: Building a durable military regime. *Asian Journal of Comparative Politics*, 5(4), 1–18. <https://doi.org/10.1177/2057891120935526>
- Croissant, A. (2024). Democratic resilience in Asia: Preventive and reactive strategies. *Global Asia*, 19(1), 10–17.
- Economist Intelligence Unit. (2024). *Democracy Index 2024*. London: The Economist Group.
- Funston, J. (2023). National resilience and democracy in Southeast Asia. Singapore: ISEAS Publishing.
- Heydarian, R. J. (2020). *The rise of Duterte: A populist revolt against elite democracy*. New York: Palgrave Macmillan.
- International IDEA. (2023). *Designing resilient institutions: Countering democratic backsliding in Asia*. Stockholm: International IDEA.
- ISEAS – Yusof Ishak Institute. (2023). *Digital disinformation in Southeast Asia: Trends and implications*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Merkel, W. (2004). Embedded and defective democracies. *Democratization*, 11(5), 33–58. <https://doi.org/10.1080/13510340412331304598>
- Mietzner, M. (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* Singapore: ISEAS Publishing.
- Selth, A. (2022). Myanmar's armed forces and the 2021 coup. *Asian Affairs*, 53(2), 275–293. <https://doi.org/10.1080/03068374.2022.2064865>

Thayer, C. A. (2021). Authoritarian resilience in Vietnam and Laos. *Contemporary Southeast Asia*, 43 (3), 395–418. <https://doi.org/10.1355/cs43-3d>

Varieties of Democracy Institute. (2025). *V-Dem Annual Democracy Report 2025*. Gothenburg: University of Gothenburg.

Economist Intelligence Unit. (2025). *Democracy Index 2024*. [Economist Intelligence Unit+1](#)

Varieties of Democracy Institute. (2025). *Democracy Report 2025*. [V-DemV-Dem](#)

Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024; Freedom on the Net 2024 (Philippines); Timor? Leste Country Report*. [Freedom House+2Freedom House+2](#) ISEAS–Yusof Ishak Institute. (2023, 2024). Disinformasi & represi digital. [ISEAS-Yusof Ishak Institute+1](#)

ASEAN. (2024). *Leaders' Review & Decision on the 5PC*; RSIS (2024) analisis 5PC. [ASEAN @RSIS_NTU](#)

Indonesia Pemilu 2024—AP/Reuters/DPR RI P3DI. [AP NewsReutersberkas.dpr.go.id](#)

Thailand 2024—Reuters/Le Monde/Time/Guardian. [ReutersLe Monde.frTIMEThe Guardian](#)

Vietnam 2024—Reuters/Al Jazeera. [ReutersAl Jazeera](#)

Kamboja 2024—AP/HRW/Reuters. [AP NewsHuman Rights WatchReuters](#)

Malaysia 2024—Bernama/East Asia Forum/The Malaysian Insight. [BERNAMAEast Asia ForumThe Malaysian Insight](#)

Timor?Leste—Reuters/Time. [ReutersTIME](#)